

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang mendapatkan akhiran-an terdapat kecendrungan perbedaan. Kata pemerintah menunjuk kepada individu-individu atau jawatan atau alat-alat perlengkapan negara, sedangkan pemerintahan adalah perbuatan atau cara-cara atau rumusan memerintah, misalnya pemerintahan yang adil, pemerintahan demokratis, pemerintahan diktator dan lain sebagainya, (dalam Tandjung, 2003: 4).

Menurut Sedarmayanti (2004;9), pemerintah yang baik dapat dikatakan sebagai pemerintah yang menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (2000:13) antara lain:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat

menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.

2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Strong dalam Syafiie (2005:22) mengemukakan pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara, ke dalam dan luar. Oleh karena itu, pertama, harus mempunyai kekuatan militer, atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua, harus mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga, harus mempunyai kekuatan financial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan Negara dalam menyelenggarakan peraturan, hal tersebut dalam rangka

penyelenggaraan kepentingan Negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah eksekutif yang melaksanakan fungsi menjalankan undang-undang, yaitu sekelompok orang yang diberi tugas untuk merencanakan, mengumpulkan, menyusun, mengorganisasi, menggerakkan, dan mengarahkan segenap upaya masyarakat/penduduk suatu Negara dalam rangka mencapai tujuan Negara yang telah ditetapkan.

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam studi ilmu politik gejala pemerintahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pusran kekuasaan. Bahkan menurut Kuper (2000: 418), istilah *government* (pemerintahan) dan segala bentuk implikasinya merupakan jantung dari studi ilmu politik. Demikian salah satu alasan mengapa ilmu pemerintahan pada umumnya sulit melepaskan diri dari bayang-bayang ilmu politik (Ndraha, 2005:7).

Menurut Kuper (2000:417), pemerintah lebih mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum. Dalam konteks itu, menurutu Robinson setidaknya terdapat 3 nilai penting yang menjadi sentrum dalam pembicaraan pemerintahan, yaitu; *akuntavilitas*, *legitimasi*, dan *transparansi*. Akuntabilitas berkaitan dengan seberapa besar efektivitas pengaruh dari mereka yang diperintah terhadap orang yang memerintah. Atau dalam bahasa sederhana adalah seberapa besar tingkat kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahnya. Legitimasi menunjukkan pada hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga negaranya serta seberapa jauh kekuasaan tersebut dipandang sah untuk diterapkan. Hal ini berkaitan dengan seberapa wajar dan pantas kekuasaan pemerintah patut

dilakukan, mengingat pemerintah adalah produk dan representasi dari masyarakat itu sendiri. Transparansi berhubungan dengan seberapa terbuka negara dalam menciptakan mekanisme untuk menjamin akses umum dalam pengambilan keputusan. Ini berkaitan dengan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang meyakinkan mereka sebagai bagian dari semua konsekuensi yang akan terjadi (Labolo, 2010,20).

2. Kebijakan Publik

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas digunakan dalam kaitannya dengan tindakan atau kegiatan pemerintah seperti perilaku negara pada umumnya. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan dan tindakan dalam pengambilan keputusan, maka sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Menurut Carl Friedrich (Abdul Wahab, 2008:3) kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson, konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno. 2014:21).

Kebijakan menurut Islamy dalam Suwitri (2011:61) meskipun merupakan kata sudah sangat dikenal dalam kehidupan sehari-hari, ternyata kata kebijakan memiliki konotasi yang berbeda dengan kebijaksanaan. Kedua kata yang sering dicampur adukkan ternyata memiliki makna yang sangat berbeda. Kebijaksanaan

berasal dari kata *wisdom*, sedangkan kebijakan berasal dari kata *policy*. Keduanya membutuhkan syarat-syarat yang berbeda dalam pelaksanaannya. Kebijaksanaan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh, sementara kebijakan dalam pelaksanaannya mencakup peraturan-peraturan di dalamnya dan sangat berkaitan dengan proses politik. Pendapat Islami tersebut berbeda dengan Abidin (2004:112) yang tidak membedakan makna antara kata kebijakan dan kebijaksanaan selama kedua istilah itu diartikan sebagai keputusan pemerintah yang relatif bersifat umum dan ditujukan untuk masyarakat umum.

Ketika berbicara tentang kajian dan praktik kebijakan publik, Samudra (1994:52) menguraikan bahwa ada tiga cakupan yang menonjol yang berkaitan dengan kajian dan praktik kebijakan publik. *Pertama* posisi kebijakan publik yang strategis dalam penentuan arah umum yang harus ditempuh untuk mengelola isu-isu yang ada di masyarakat, *kedua* menentukan ruang lingkup masalah yang dihadapi pemerintah, dan *ketiga* kemampuannya untuk mengetahui atau memetakan ukuran besarnya organisasi publik. Ketiga poin tersebut membuka wawasan kita bahwa kebijakan publik adalah sesuatu yang riil dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah, antara individu dan Negara. Kebijakan publik adalah sebuah respon atas apa yang sedang terjadi di masyarakat juga mencerminkan tentang apa-apa yang diinginkan untuk terjadi dan berubah dalam sebuah masyarakat.

Sementara Thomas Dye dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik atau kebijakan Negara sebagai "*whatever governments choose to do or not to do*" (Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak

melakukan). Amara Raksasataya dalam Islamy juga mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Berbeda dengan James E.Anderson dalam Subarsono (2006:2) kebijakan publik adalah sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya bidang pendidikan, politik, ekonomi, pertanian, industry, pertahanan, dan sebagainya, meskipun ada para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Dalam dimensi subjek Abidin (2004:121) kebijakan publik adalah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat dianggap kebijakan yang resmi sehingga kebijakan tersebut mempunyai kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk patuh dan melaksanakan kebijakan tersebut. Wibowo (2004:56) memandang pemerintah sebagai suatu organisasi yang dibentuk sebagai hasil musyawarah atau konsensus dari semua pelaku politik baik pelaku individu maupun kelompok dan organisasi.

Menurut Nugroho (2009:135) kebijakan dalam arti peraturan perundangan mempunyai sejumlah bentuk, untuk Indonesia kita melihat tiga jenis kebijakan publik, yaitu yang dibuat oleh legislatif, eksekutif dan legislatif bersama eksekutif (dan sebaliknya).

Dunn dalam Wibowo (2004:70) mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan, pemerintah melakukan aksi dan tindakan yang berupa:

- 1) Penghimpunan sumber daya yang disebut input kebijakan
- 2) Pengelolaan sumber daya yang disebut proses/implementasi kebijakan, dimana dalam tahapan ini terdapat perilaku administratif, organisasional, dan politis.

3. Implementasi Kebijakan

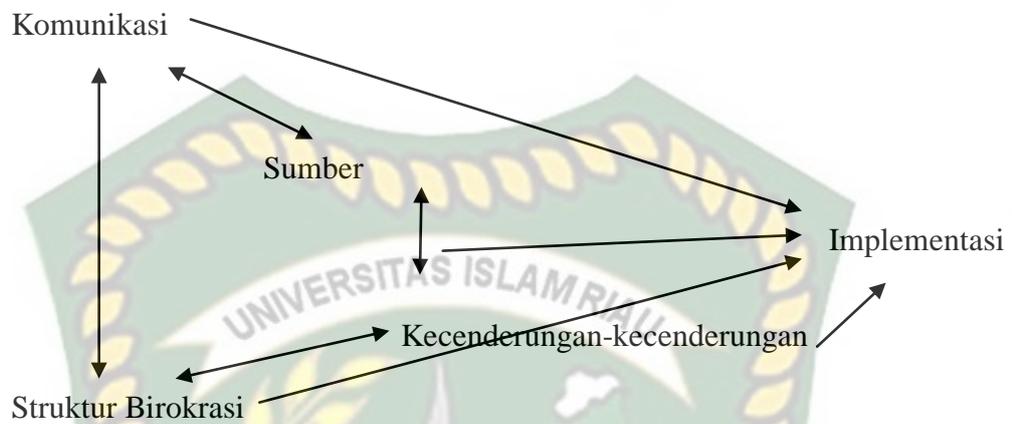
Suatu kebijakan harus dapat diimplementasikan. Meter dan Horn dalam Wibowo (2004:92) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan. Implementasi kebijakan bisa didefinisikan juga sebagai cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Dwijowijoto dalam Syafaruddin, 2008:78).

Ada empat kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan, yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan (Nugroho, 2009:145).

Dalam proses implementasi terdapat faktor atau variabel yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi, faktor-faktor ini juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi, faktor-faktor juga secara tidak langsung mempengaruhi implementasi kebijaksanaan melalui dampak pada masing-masing faktor. Dengan perkataan lain, komunikasi mempengaruhi sumber, kecenderungan dan struktur birokrasi yang pada gilirannya mempengaruhi implementasi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Bagan II.1 Dampak Langsung dan Tidak Langsung pada Implementasi



Sumber: Winarno (2014:180).

Menurut Edwards dalam Winarno (2014:156-179) terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi yaitu mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan oleh implementor kepada kelompok sasaran atau *target group* untuk mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan memunculkan resistensi dari kelompok sasaran. Para implementor harus secara intensif melakukan berbagai cara untuk mensosialisasikan tujuan dan manfaat dari pelaksanaan sebuah kebijakan.

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi menyangkut

proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas hal-hal yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat.

Komunikasi sangat penting, karena suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana, dimana komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementer akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini terjadi karena komunikasi implementasi tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi kebijakan, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan

kebijakan, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif, dimana tanpa sumberdaya maka kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Dalam hal ini sumberdaya yang dimaksud adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan.

Ada dua indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek sumberdaya ini, yaitu:

- a. Kualitas pelaksana, seperti staf yang cukup dari segi jumlah.
- b. Kuantitas pelaksana, seperti memadai dan berkompeten dibidangnya.

3. Disposisi

Adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi implementer dari program, dalam hal ini

terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sedang apabila implementor memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Edwards menyatakan bahwa dua aspek yang perlu diperhatikan dalam mengatasi dampak dari sikap birokrat/pelaksana yang seringkali mengesampingkan implementasi kebijakan yang telah dibuat, yaitu:

- a. Penempatan pegawai (*staffing the bureaucracy*), dimana sikap dari para aparat birokrasi kadangkala menyebabkan masalah apabila sikap ataupun cara pandangnya berbeda dengan pembuat kebijakan. Apabila mendapat masalah dalam implementasi kebijakan khususnya dari perilaku aparat birokrasi pelaksana. Hal ini diselesaikan dengan mempertimbangkan pengangkatan eksekutif, sistem pelayanan publik, sistem aturan kepegawaian dan metode-metode personel yang sudah ada.
- b. Insentif (*incentives*), dimana mengganti susunan pegawai pada birokrasi pemerintahan adalah hal yang tidak mudah dan hal tersebut tidak menjamin proses implementasi berjalan lancar. Teknik lain yang dapat digunakan adalah dengan mengubah insentif. Memanipulasi atau mengubah insentif pembuat kebijakan pada level atas diharapkan dapat mempengaruhi kinerja atau tindakannya.

4. Struktur birokrasi.

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Edwards menyatakan bahwa aspek-aspek dari struktur birokrasi, yaitu:

- a. Adanya suatu SOP (*Standard Operation Procedure*) yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program. SOP juga memberikan keseragaman dalam tindakan para pegawai dalam organisasi yang kompleks dan luas, dimana dalam pelaksanaannya dapat menghasilkan fleksibilitas yang sangat baik (seseorang dapat dipindahkan dari suatu lokasi ke lokasi yang lain) serta adanya keadilan dalam pelaksanaan aturan.
- b. Fragmentasi (*fragmentation*) adalah adanya penyebaran tanggung jawab pada suatu area kebijakan di antara beberapa unit organisasi. Adapun akibat dari adanya fragmentasi, yaitu menyebabkan penyebaran tanggung jawab dan hal ini mengakibatkan koordinasi kebijakan menjadi sulit, dimana sumber daya dan kebutuhan atas kebutuhan atas kewenangan untuk menyelesaikan masalah yang timbul kadangkala tersebar di antara beberapa unit birokrasi. Oleh sebab itu perlu adanya kekuatan pemusatan koordinasi antara unit-unit yang terkait dan hal tersebut bukan hal yang mudah.

4. Program Raskin

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan

lebih mudah untuk dioperasionalkan. Hardjito (2007:79) menjelaskan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan atau dilaksanakan. Beliau juga menjelaskan bahwa program merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya suatu kegiatan. Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan.

Raskin digulirkan sejak 1 Juli 1998 dengan nama Operasi Pasar Khusus (OPK) dan berganti nama menjadi RASKIN sejak tahun 2002, sebagai bagian dari program Jaringan Pangan Sosial (JPS), program ini digulirkan bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga miskin sekaligus di maksudkan guna menanggulangi kemiskinan. Sebab, secara filosofis ketika kebutuhan pangan sudah terpenuhi maka masyarakat dapat mengalihkan pengeluaran pada kebutuhan selain bahan pangan.

Beras miskin (Raskin) pada dasarnya adalah beras murah yaitu yang harga jualnya kepada masyarakat telah disubsidi oleh pemerintah, yang diberikan kepada keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Penetapan jumlah keluarga miskin yang berhak menerima Raskin adalah sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam hal ini Menko Kesra yaitu berdasarkan data dari BPS dan BKKBN. Kebijakan ini diambil oleh pemerintah agar dalam memberikan subsidi dan mengupayakan bantuan, dapat disalurkan tepat mencapai sasaran. Secara kriteria BKKBN telah memiliki standar keluarga yang masuk kategori miskin yaitu keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. Keluarga prasejahtera adalah keluarga yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Anggota keluarga hanya makan dua kali sehari

2. Anggota keluarga mempunyai pakaian yang berbeda terbatas untuk di rumah, bekerja/bersekolah dan bepergian
3. Lantai rumah maksimal terbuat dari plester.

Berdasarkan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), ada enam tepat sebagai keberhasilan program beras miskin, yaitu:

1. Tepat sasaran, sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sasaran dari program beras miskin itu sendiri yaitu keluarga miskin yang ada di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
2. Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah pagu beras yang diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
3. Tepat harga, maksudnya adalah harga yang diberikan kepada keluarga miskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
4. Tepat waktu, yaitu penyesuaian waktu penyaluran beras miskin tersebut.
5. Tepat kualitas, yaitu kualitas atau mutu dari beras yang diberikan kepada keluarga miskin.
6. Tepat administrasi, maksudnya adalah ketepatan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang sebenarnya terjadi.

B. Kerangka Pikiran.

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikiran dari penelitian ini, sebagai berikut:

Bagan II.2 Kerangka Pikiran Tentang Pengelolaan Program Bantuan Beras Miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.



Sumber: Modifikasi penelitian, 2018.

C. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas serta dihubungkan dengan landasan teori yang ada maka penulis mengemukakan hipotesis sebagai berikut: “Diduga pengelolaan program bantuan beras miskin di

Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar belum terlaksana dengan baik”.

D. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Konsep mempunyai tingkah generasi yang berbeda-beda. Semakin dekat suatu konsep kepada realita, maka semakin dekat konsep itu diukur. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoperasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain:

1. Program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan atau dilaksanakan, dan sekumpulan kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Program bantuan beras miskin merupakan kegiatan pemerintah dalam rangka mengurangi beban masyarakat miskin dalam mengkonsumsi beras, dalam hal ini pemerintah memberikan beras murah kepada rumah tangga miskin.
3. Tepat sasaran, sasaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sasaran dari program beras miskin itu sendiri yaitu keluarga miskin yang ada di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.
4. Tepat jumlah, jumlah yang dimaksud adalah jumlah pagu beras yang diberikan kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM)
5. Tepat harga, maksudnya adalah harga yang diberikan kepada keluarga miskin sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.

6. Tepat waktu, yaitu penyesuaian waktu penyaluran beras miskin tersebut.
7. Tepat kualitas, yaitu kualitas atau mutu dari beras yang diberikan kepada keluarga miskin.
8. Tepat administrasi, maksudnya adalah ketepatan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan dengan pelaksanaan yang sebenarnya terjadi.

E. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang pengelolaan program bantuan beras miskin raskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar. Adapun penjabaran variabel-variabel tersebut kedalam operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II.1: Konsep Operasional dan Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengelolaan Program Bantuan Beras Miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub Indikator | Skala Pengukuran |
|--|--|------------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Beras miskin (Raskin) adalah beras yang harga jualnya kepada masyarakat telah disubsidi oleh pemerintah, yang diberikan kepada keluarga prasejahtera dan sejahtera satu. | Pengelolaan program bantuan beras miskin | 1. Tepat sasaran | a. Pemahaman RTS tentang penerima Raskin b. Kreteria penerima Raskin c. Pengetahuan RTS terhadap program Raskin | Ordinal |
| | | 2. Tepat harga | a. Harga Raskin b. Pembagian Raskin c. Pembayaran Raskin | Ordinal |
| | | 3. Tepat Jumlah | a. Jumlah beras b. Tidak ada pengurangan jumlah beras c. Kecukupan beras | Ordinal |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--|---------|
| | | 4. Tepat Waktu | a. Waktu penerimaan Raskin b. Waktu penyaluran Raskin c. Jadwal pembagian Raskin | Ordinal |
| | | 5. Tepat kualitas | a. Keadaan beras b. Kelayakan beras c. Standar kualitas beras | Ordinal |
| | | 6. Tepat Administrasi | a. Sosialisasi RTS b. Kelayakan menjadi RTS c. Pengetahuan menjadi RTS | Ordinal |

F. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui pengelolaan program bantuan beras miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, diukur melalui beberapa indikator. Selanjutnya indikator ini akan dijabarkan dalam beberapa sub indikator dijelaskan satu persatu yang juga menjadi poin-poin dari pengelolaan program bantuan beras miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar itu sendiri. Katagori penilaian terhadap pengertian seluruh indikator variabel dibagi dalam tiga kelompok kategori yaitu: terlaksana, cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

a. Ketepatan sasaran pengelolaan program bantuan beras miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, pengukurannya adalah:

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $> 67\%$.

Cukup terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $34\% - 66\%$

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $< 33\%$.

- b. Ketepatan harga pengelolaan program bantuan beras miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, pengukurannya adalah:

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $> 67\%$.

Cukup terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $34\% - 66\%$

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $< 33\%$.

- c. Ketepatan jumlah pengelolaan program bantuan beras miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, pengukurannya adalah:

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $> 67\%$.

Cukup terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $34\% - 66\%$

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $< 33\%$.

- d. Ketepatan waktu pengelolaan program bantuan beras miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, pengukurannya adalah:

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel $> 67\%$.

Cukup terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

- e. Ketepatan kualitas pengelolaan program bantuan beras di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, pengukurannya adalah:

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

- f. Ketepatan administrasi pengelolaan program bantuan beras miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, pengukurannya adalah:

Terlaksana : Apabila semua item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel > 67%.

Cukup terlaksana : Apabila 2 dari 3 item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel 34 % -66%

Tidak terlaksana : Apabila hanya satu atau tidak ada satupun dari item dapat dilaksanakan, atau jawaban responden pada tabel < 33 %.

G. Ukuran Variabel

Ukuran variabel pengelolaan program bantuan beras miskin di Desa Bukit Kratai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Terlaksana : apabila 3 atau seluruhnya dari sub indikator terlaksana dengan baik.
- b. Cukup terlaksana : apabila 1,2 dari sub indikator terlaksana
- c. Tidak terlaksana : apabila dari semua sub indikator tidak terlaksana sama sekali.

